

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DANA SUKUK
UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN AGAMA DI PALANGKA RAYA**

***THE ROLE OF BANK SYARIAH INDONESIA AS AN INTERMEDIARY INSTITUTION FOR
SUKUK FUNDS FOR INFRASTRUCTURE FINANCING MINISTRY OF RELIGION IN
PALANGKA RAYA***

Muhammad Fauzan^{1a}, Wahyu Akbar², Lisnawati³

¹Institut Agama Islam Palangka Raya, Jalan G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 73112, Indonesia

²Institut Agama Islam Palangka Raya, Jalan G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 73112, Indonesia

³Institut Agama Islam Palangka Raya, Jalan G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 73112, Indonesia

^aKorespondensi e-mail: semuabisa824@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Bank syariah Indonesia (BSI) dalam menyalurkan dana sukuk untuk membiayai infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang krusial. Melalui metode kualitatif seperti tinjauan literatur, wawancara, dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa BSI telah memfasilitasi pendanaan tujuh dari sepuluh proyek infrastruktur antara tahun 2021 dan 2023, termasuk pembangunan ruang kuliah dan fasilitas praktikum. Kemitraan BSI dan Kementerian Agama mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama, sosialisasi manfaat sukuk, transparansi alokasi dana, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas proyek untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan berbasis syariah di Palangka Raya. BSI berperan penting dalam mendukung ekonomi syariah dan pembangunan fisik di wilayah tersebut.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia, Infrastruktur, Intermediasi, Sukuk.

ABSTRACT

This research investigates how Bank Syariah Indonesia (BSI) utilizes sukuk funds for financing the Palangka Raya project under the Ministry of Religious Affairs infrastructure. Due to the government's tight budget, sukuk has emerged as a vital source of funding. According to this study, which used qualitative techniques including literature reviews, interviews, and observations, BSI helped finance seven of ten infrastructure projects between 2021 and 2023, including the building of lecture halls and practicum facilities. The Ministry of Religious Affairs and BSI's collaboration expedites the construction of community-required infrastructure while guaranteeing adherence to sharia law. area. In order to enhance sharia-based sustainable infrastructure in Palangka Raya, this research recommends more collaboration, socialization of sukuk advantages, openness of budget distribution, and regular project effectiveness review. The Islamic economy and physical development are significantly supported by BSI

Keyword: Bank Syariah Indonesia, Infrasruktur, Intermediate, Sukuk.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Palangka Raya, menghadapi kendala anggaran yang signifikan, menghambat penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Keterbatasan anggaran pemerintah memperlambat realisasi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, sehingga mempengaruhi operasional dan pelayanan Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya. (Panjaitan *et al.*, 2019). Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya fasilitas yang tersedia, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, yang esensial bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan. Bank syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai solusi melalui penyaluran dana sukuk, yang memungkinkan pembiayaan proyek infrastruktur secara syariah, mengatasi keterbatasan anggaran, dan mempercepat pembangunan fasilitas yang dibutuhkan. (Khairunnisa *et al.*, 2021)

Hasil temuan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan agama di Palangka Raya masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Rachmansyah, 2025) Kondisi ini terlihat dari jumlah perguruan tinggi agama, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang jauh lebih sedikit di Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi keterbatasan ini, maka dapat digunakan alternatif lain yaitu sukuk yang mana Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan dalam menyalurkan dana sukuk berbasis prinsip syariah untuk mendukung pembangunan berbagai proyek, seperti ruang kuliah dan fasilitas praktikum di Palangka Raya. (Suherman *et al.*, 2024)

Studi mengenai pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, termasuk melalui sukuk, telah menyoroti potensinya dalam pembangunan ekonomi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Di Indonesia, sukuk berfungsi sebagai sumber

pendanaan bagi negara dan membantu pertumbuhan beberapa inisiatif infrastruktur. Penelitian sebelumnya, termasuk yang disebutkan dalam artikel Anisa Ilmia. lebih fokus pada perkembangan sukuk secara umum dan kontribusinya terhadap pembiayaan infrastruktur secara makro. Studi-studi ini cenderung membahas peningkatan penerbitan sukuk dari tahun ke tahun dan minat investor terhadap instrumen ini. (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019) celah penelitian terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Bank syariah Indonesia (BSI), berperan dalam mengelola dan menyalurkan dana sukuk untuk proyek-proyek infrastruktur spesifik di tingkat lokal, seperti yang dilakukan pada Kementerian Agama di Palangka Raya. Penelitian terdahulu belum secara khusus membahas peran BSI dalam konteks ini. (Robin *et al.*, 2020) Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran BSI secara kualitatif dalam memfasilitasi proyek infrastruktur Kementerian Agama melalui dana sukuk.

Maksud dari kajian ini ialah mengamati secara mendalam bagaimana BSI berperan dalam penyaluran dana sukuk untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas tentang peran Bank syariah Indonesia sebagai Lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana sukuk. (Robin *et al.*, 2020). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi BSI, Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sukuk untuk pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan serta sesuai aturan syariah

MATERI DAN METODE

MATERI

Peran BSI dalam Penyaluran Dana Sukuk

Bank syariah Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah lembaga yang berfungsi dalam konteks memahami prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar

ekonomi syariah dari sudut pandang epistemologi. Dalam konteks ini, epistemologi mengacu pada bagaimana kita, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengetahui tentang sistem keuangan. (Yudhira, 2023)

Fungsi bank syariah indoneisa ada 3 yaitu Menghimpun Dana: Bank syariah berfungsi untuk mengumpulkan dana surplus masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun investasi, berperan sebagai sumber pendanaan potensial Penghimpunan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan). Hal ini bertujuan untuk memobilisasi sumber daya keuangan secara produktif dan adil, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan penggunaan dana untuk kepentingan sosial dan ekonomi. (Kurniawan *et al.*, 2022)

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam penyaluran dana sukuk sebagai berikut:

- a. Penyalur Dana BSI bertindak sebagai mitra dalam penyaluran dana sukuk kepada pihak pelaksana proyek.
- b. Pendukung Tata Kelola Keuangan Proyek BSI menyediakan sistem layanan keuangan berbasis syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana proyek sesuai prinsip syariah, transparan, dan akuntabel.
- c. Mitra Monitoring dan Evaluasi Dalam beberapa kasus, BSI juga turut dilibatkan dalam pengawasan arus kas proyek untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana kerja dan anggaran.

Dengan peran-peran tersebut, BSI tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan pasar sukuk di Indonesia tetapi juga membantu memajukan ekonomi berbasis syariah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Teori Intermediasi Antara Bank syariah dan sukuk

Intermediasi bank syariah di Indonesia berfungsi sebagai fasilitator dalam proses

penghimpunan dan pendistribusian dana dari masyarakat untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur. BSI bergerak berdasarkan aturan islam yang menghindari prosedur riba, maysir, dan gharar, serta berfokus pada keadilan dan pembiayaan kegiatan usaha yang halal (Al Faqih, 2018)

“*Sak*” adalah Istilah yang berasal dari arab menandakan sertifikat atau akta kepemilikan, diplesetkan menjadi “sukuk.” Frasa ini juga dikatakan berasal dari kata Eropa “*cheque*,” yang menggambarkan kontrak atau pengalihan hak dan kewajiban yang harus sesuai dengan standar syariah, menurut sumber-sumber lain. (Diniyah *et al.*, 2022)

Dalam konteks pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Agama di Palangka Raya, sukuk menjadi instrumen penting. sukuk berfungsi sebagai surat utang syariah yang dimanfaatkan dalam pendanaan proyek-proyek tertentu. Penerbitan sukuk dapat membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas dan mendiversifikasi portofolio investasi mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja intermediasi Penelitian menunjukkan bahwa sukuk negara yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat berpengaruh positif apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. (Atika, 2018)

Sukuk memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko likuiditas. Dengan dukungan dari pemerintah melalui penerbitan sukuk, bank syariah dapat lebih aktif dalam menyalurkan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan untuk memastikan bahwa investasi dalam sukuk s ilandasi aturan syariah dan menghasilkan nilai tambah yang dirasakan oleh masyarakat luas. (Nurbiyanto & Pribadi, 2020)

Intermediasi bank syariah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui

instrumen sukuk, Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya. Bank-bank syariah dapat menggunakan sukuk untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas mereka selain menyediakan pembiayaan yang sejalan dengan aturan syariah. Dengan adanya berbagai jenis sukuk seperti sukuk ritel dan sukuk negara, bank syariah dapat lebih aktif menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Profil Kementerian Agama Palangka Raya

Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan keagamaan di wilayah Kota Palangka Raya. Fokus utama lembaga ini meliputi peningkatan mutu pendidikan agama, penyediaan layanan ibadah, serta upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu, Kementerian Agama Kota Palangka Raya berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat serta lembaga pendidikan berbasis keagamaan, dan mendorong penguatan nilai-nilai moral serta etika keagamaan. Di sisi lain, lembaga ini juga berusaha mewujudkan tata kelola Tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas dan bebas dari praktik KKN, serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. (Khunaifi & Fitriyanto, 2024)

Memasukkan keyakinan sebagai sumber nilai moral dan spiritual, agama menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. serta bermasyarakat secara luas merupakan tujuan dari Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan standar pendidikan agama. Dengan semua hal diatas maka dapat kita hubungkan berdasarakan visi misi dari kementerian agama palangka raya bahwa Dengan adanya dukungan dana sukuk dari BSI, Kementerian Agama dapat meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan dan pendidikan, yang pada gilirannya

membantu mempromosikan persatuan agama dan memperkuat nilai-nilai agama di daerah tersebut. Selain itu, kolaborasi ini juga mencerminkan komitmen BSI dalam Memberikan sumbangsih bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan di daerah, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

Pengertian Pembiayaan infrastruktur melalui sukuk

Pembiayaan infrastruktur melalui sukuk yang disalurkan oleh BSI menjadi bentuk pembiayaan produktif berbasis syariah, di mana aset yang dihimpun dari masyarakat melalui penerbitan sukuk dimanfaatkan untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan madrasah, kampus keagamaan, dan fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan temuan Nurbiyanto & Pribadi, yang menyatakan bahwa sukuk retail berdasarkan proyek di Kementerian Agama dapat menjadi pilihan sumber dana infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan. (Yudhira, 2023)

Namun, dalam konteks pembiayaan infrastruktur terutama yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia (BSI) melalui instrumen sukuk pembiayaan tidak hanya sebatas aktivitas penyediaan dana, tetapi juga mencakup aspek intermediasi, perencanaan syariah, serta pengawasan prinsip kepatuhan syariah dalam pelaksanaan proyek.

Menurut Ilmia (2021), sukuk negara telah terbukti menjadi alternatif pembiayaan yang efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek-proyek pendidikan dan keagamaan. Sukuk digunakan sebagai instrumen berbasis aset riil yang mewakili kepemilikan terhadap proyek atau aset yang dibiayai, sehingga memberikan kepastian dan transparansi dalam penggunaannya. (Nabela & Thamrin, 2022)

Dengan demikian, pembiayaan dalam konteks ini tidak hanya memenuhi aspek keuangan, tetapi juga mendukung misi

pembangunan ekonomi dan sosial berbasis Lima aspek utama dari maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji fungsi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif sebagai lembaga intermediasi dana sukuk dalam pembiayaan infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya. Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan tiga pemangku kepentingan utama, pelaksana pembangunan, yang bertanggung jawab atas realisasi fisik proyek, Bank Syariah Indonesia, yang berperan sebagai lembaga penyalur dana sukuk, dan Kementerian Agama, yang merupakan pengelola dan pendukung program. Untuk meningkatkan validitas temuan, Dengan menganalisis dan memeriksa ulang data dari ketiga sumber tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber guna memperoleh informasi yang objektif dan komprehensif terkait proses pembiayaan, penyaluran dana, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. (Diniyah *et al.*, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur di palangkaraya melalui dana sukuk

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya, Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah perlu menginvestasikan sejumlah besar dana untuk pembangunan infrastruktur. Namun, sulit untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata karena rendahnya dana APBD. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pendanaan alternatif yang tidak hanya andal, tetapi juga Mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Salah satu instrumen yang berpotensi besar dalam menjawab tantangan tersebut ialah **sukuk** (Suherman *et al.*, 2024)

Penerbitan sukuk ritel oleh pemerintah juga berkontribusi dalam pembiayaan

proyek-proyek strategis, termasuk infrastruktur pendidikan dan layanan publik lainnya. Menurut laporan Pemprov Kalimantan Tengah, Perkiraan kebutuhan dana tahunan yang sesuai dengan standar untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 4 triliun rupiah. Dalam konteks ini, sukuk negara berbasis proyek hadir sebagai solusi untuk mempercepat realisasi pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong investasi dan pemberdayaan industri dalam negeri. (Raharjo, 2023)

Dari sudut pandang konseptual, infrastruktur sangat penting untuk menopang usaha sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Grigg, infrastruktur adalah sistem fisik yang terdiri dari bangunan, drainase, irigasi, transportasi, dan utilitas publik lainnya yang berhubungan secara langsung dan tidak terpisahkan. Dalam hal ini, infrastruktur berfungsi sebagai fondasi struktur sosial ekonomi masyarakat. sarana fisik yang dibuat atau disediakan oleh lembaga-lembaga publik untuk mendukung operasi pemerintah, seperti pasokan air bersih, listrik, transportasi, dan layanan sosial lainnya, kadang-kadang disebut sebagai infrastruktur, menurut Stone. (Prasetyo & Firdaus, 2012)

Todaro juga menekankan bahwa infrastruktur mencakup aspek fisik dan finansial yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan ekonomi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan komunikasi. Bahkan, Ramirez menemukan bahwa keberadaan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Gultom & Tini, 2020)

Dengan demikian, sukuk baik dalam bentuk green sukuk maupun sukuk negara telah menjadi alternatif pembiayaan yang strategis dan sesuai syariah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur di Palangka Raya. Keberadaan instrumen ini tidak hanya membantu menutup kesenjangan anggaran daerah, tetapi juga mempercepat pembangunan berkelanjutan

dan sebuah strategi menyeluruh yang segera meningkatkan standar hidup masyarakat.

Kontribusi Sukuk terhadap Penguatan Infrastruktur Pendidikan dan Keagamaan di Kementerian Agama Palangka Raya

Kementerian Agama Palangka Raya merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang agama, pendidikan agama, dan pembinaan masyarakat beragama. Terbentuknya masyarakat yang religius, damai, dan terhormat dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah tujuan utama lembaga ini.

Kementerian Agama Palangka Raya menyusun beberapa acara dan program dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan praktik keagamaan di masyarakat. Ini termasuk program pendidikan, pelatihan bagi tokoh agama, serta kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Kementerian Agama Palangka Raya berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis melalui pengelolaan urusan keagamaan dan pendidikan agama yang baik. Dalam konteks kementerian Agama Palangka Raya, pembangunan infrastruktur dapat berfokus pada:

- a. Fasilitas Keagamaan: Pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya yang memadai dan nyaman untuk digunakan masyarakat.
- b. Pendidikan Agama: Pembangunan fasilitas pendidikan agama yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama masyarakat.
- c. Sosial dan Kesejahteraan: Pembangunan fasilitas sosial seperti tempat pengobatan, tempat penitipan anak, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang telah dijelaskan, kementerian Agama Palangka Raya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut

Pembangunan infrastruktur di kementerian Agama Palangka Raya dapat dipahami melalui kajian teori yang relevan dengan pengembangan infrastruktur secara umum. Dengan fokus pada fasilitas keagamaan, pendidikan agama, dan sosial-kesejahteraan, kementerian Agama Palangka Raya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.



Gambar 1. Total Pembangunan Infrastruktur dan Penyaluran Dana Sukuk 2021-2023

Berdasarkan grafik di atas, Kemenag Kota Palangka Raya bertanggung jawab atas berbagai kemajuan berdasarkan hasil observasi dan penelitian peneliti sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 10 pembangunan yang sudah terlaksana. Pada tahun 2021, terdapat empat proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Palangka Raya. Dari keempat proyek tersebut, tiga proyek menggunakan sumber pembiayaan dari sukuk negara dan disalurkan secara langsung oleh BSI. Sementara satu proyek lainnya menggunakan kas negara dan tidak melalui jalur pembiayaan sukuk. Proyek-proyek yang disalurkan melalui sukuk dan BSI pada tahun ini meliputi:

Pembangunan sarana dan prasarana gedung kuliah serta pelayanan akademik Fakultas Dharma Acarya dan Fakultas Dharma Duta di Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana pendidikan tinggi berbasis keagamaan di lingkungan kampus. Pembangunan ruang kelas baru (rkb) di MTsN Palangka Raya. Fasilitas ini dibangun untuk menambah ruang belajar dan mengakomodasi peningkatan jumlah siswa. Penataan halaman lingkungan gedung kuliah dan pelayanan akademik di Fakultas Dharma Acarya dan Dharma Duta. Proyek ini berfokus pada pembangunan lanjutan yang mencakup perbaikan sarana lingkungan fisik kampus agar lebih representatif dan mendukung proses akademik. Sementara itu, satu proyek lainnya yakni pembangunan gedung praktikum mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya dilaksanakan dengan dana dari kas negara dan tidak melalui pembiayaan sukuk, sehingga BSI tidak terlibat dalam penyalurannya.

Pada tahun berikutnya, yaitu 2022, terdapat tiga proyek pembangunan. Dua di antaranya menggunakan dana sukuk dan melibatkan BSI sebagai penyalur utama, sementara satu proyek dibiayai oleh kas negara. Dua proyek yang didanai oleh sukuk dan disalurkan oleh BSI antara lain: Pembangunan open stage atau panggung terbuka di IAHN Tampung Penyang Palangka Raya. Proyek ini tidak hanya memiliki nilai estetika dan fungsi seremonial, tetapi juga mendukung kegiatan akademik dan keagamaan kampus.

Pembangunan gedung kelas baru di MTsN Palangka Raya. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ruang belajar yang layak di lembaga pendidikan agama. Sementara itu, proyek lainnya yakni pembangunan tahap kedua gedung praktikum mahasiswa di IAKN Palangka Raya tidak menggunakan dana sukuk dan tidak disalurkan oleh BSI, karena bersumber dari kas negara.

Dari seluruh proyek yang terlaksana antara tahun 2021 hingga 2023, diketahui bahwa sebanyak delapan proyek menggunakan pembiayaan sukuk, dan dari delapan tersebut, tujuh proyek secara langsung disalurkan melalui Bank syariah Indonesia (BSI). Temuan ini menunjukkan peran dominan BSI sebagai lembaga keuangan syariah dalam membantu menyalurkan dana publik berbasis sukuk secara efektif. Keberadaan BSI dalam mekanisme penyaluran dana sukuk telah menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan keagamaan yang berkelanjutan, sesuai prinsip maqashid syariah

Mekanisme Penyaluran Dana Sukuk dan Peran BSI dalam Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Agama Palangka Raya

Penerbitan Sukuk Negara Sukuk diterbitkan oleh pemerintah sebagai produk Kementerian Agama mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur untuk dibiayai melalui sukuk, yakni surat berharga negara yang berbasis pada prinsip syariah. kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ppn/Bappenas untuk disetujui. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang dan kajian mendalam untuk memastikan bahwa proyek yang diajukan relevan dan memiliki dampak positif yang signifikan. Proyek yang diusulkan juga harus memenuhi kriteria-kriteria spesifik yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Ibrahim, 2013)

Alokasi Dana Setelah proposal disetujui, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk dialokasikan kepada proyek-proyek yang telah disetujui. Dana ini akan langsung disalurkan kepada berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan madrasah, pesantren, rumah sakit, dan fasilitas keagamaan lainnya. Setiap proyek yang memperoleh pendanaan dari sukuk harus didesain dan dilaksanakan berdasarkan saran utama adalah asas syariah yang dikembangkan oleh DSN-MUI. Untuk menjamin bahwa penggunaan dana

tidak menyimpang dari aturan syariah, DSN-MUI harus hadir. (Rukhul, 2016)

Pelaksanaan Proyek Setelah dana sukuk dialokasikan, Kementerian Agama bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup perencanaan terperinci, proses tender yang transparan, pemilihan vendor, serta pembangunan fisik proyek. Transparansi dan akuntabilitas sangat diutamakan dalam seluruh tahapan ini, mulai dari pemilihan kontraktor hingga penyelesaian proyek. Kementerian Agama juga melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan proses pembangunan untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek mematuhi ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Semua ini ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan kualitas tinggi dan efisien. (Yuliani *et al.*, 2020)

Pengawasan dan Pelaporan Mekanisme pengawasan dan pelaporan sangat penting dalam proses penyaluran dana sukuk. Kementerian Agama wajib melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta lembaga-lembaga pengawas lainnya. Laporan ini mencakup penggunaan dana, tahapan pembangunan, serta capaian yang telah diperoleh. Pengawasan juga dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyalahgunaan. Transparansi dalam setiap langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran dana sukuk ini. Selain pengawasan internal, ada juga audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen untuk memverifikasi kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. (Selamet & Sup, 2021)

Evaluasi dan Penyelesaian Setelah proyek selesai, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas penggunaan dana sukuk. Evaluasi ini mencakup aspek kualitas, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan

terhadap prinsip syariah dan regulasi pemerintah. Hasil evaluasi dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan di masa mendatang serta memastikan bahwa setiap proyek yang didanai melalui sukuk memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan infrastruktur di sektor keagamaan. Kementerian Agama kemudian menyelesaikan laporan akhir yang disampaikan kepada semua pihak terkait, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik berbasis syariah. (Pribadi, 2020)

Berdasarkan hal diatas terdapat beberapa pembangunan yang pembiayaannya menggunakan sukuk pemerintah sejak tahun 2021 sampai 2023 dari 10 pembangunan infrasturktur yang di naungi oleh kementerian agama palangka raya terdapat 8 pembangunan yang dibiayai oleh sukuk dan 7 pembangunan yang disalurkan oleh BSI hal ini saya dapatkan Ketika saya melakukan penelitian di kementerian agama palangka raya. Adapun sekema dalam penyaluran dana sukuk sebagai berikut.

BSI berperan penting dalam penyaluran dana sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur di Kementerian Agama Palangka Raya, yang mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan. Anggaran pemerintah yang terbatas menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur yang memadai. Sukuk menjadi solusi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan BSI berperan sebagai perantara utama dalam penyaluran dana tersebut. (Syafriada *et al.*, 2017)

Bank syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana sukuk untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya. Dalam praktiknya, BSI memfasilitasi pendanaan sejumlah proyek yang meliputi pembangunan ruang kuliah, ruang kelas tambahan, fasilitas praktikum mahasiswa, hingga panggung terbuka. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut.

Sebagai penyalur dana sukuk, BSI mengumpulkan dana dari masyarakat dan investor melalui penerbitan sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek yang telah disetujui oleh Kementerian Agama. Seluruh proses ini diawasi oleh DPS dalam rangka memastikan keselarasan dengan ajaran syariah. (Diniyah *et al.*, 2022)

Selain itu, kemitraan antara BSI dan Kementerian Agama memberikan manfaat nyata berupa akselerasi proyek infrastruktur dan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat di sektor pendidikan dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana sukuk melalui BSI tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. (Aini & Luthfi, 2019)

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan BSI memainkan peran krusial dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur Kementerian Agama di Palangka Raya melalui penyaluran dana sukuk. Kemitraan antara BSI dan Kementerian Agama melalui mekanisme sukuk merupakan model pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan.

Dampak Penyaluran Dana Sukuk oleh BSI terhadap Pembangunan Infrastruktur Kementerian Agama Palangka Raya

Contoh nyata dari dampak penyaluran dana sukuk oleh BSI dapat dilihat pada, pembangunan ruang kelas baru di MTsN Palangka Raya dan pembangunan open stage di IAHN Tampung Penyang juga menunjukkan efektivitas pemanfaatan dana sukuk dalam mendukung fasilitas pendidikan dan keagamaan. Sebagian besar proyek tersebut dibiayai melalui sukuk dan disalurkan oleh BSI, membuktikan kontribusi nyata lembaga keuangan syariah

ini terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

1. Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, terutama di sektor pendidikan dan keagamaan. BSI, melalui penyaluran dana sukuk, berperan penting dalam mengatasi kendala ini. Dana sukuk memungkinkan proyek-proyek yang sebelumnya terhambat dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan. (Pardi & Kurniawan, 2024)

Rincian Dampak Percepatan Pembangunan:

Peningkatan Kapasitas Fisik: Dana sukuk telah memfasilitasi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama. Peningkatan kapasitas fisik ini secara langsung mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan.

Pengadaan Peralatan Modern: Selain pembangunan fisik, dana sukuk juga digunakan untuk pengadaan peralatan modern, seperti komputer, peralatan laboratorium, dan fasilitas multimedia. Peralatan ini memungkinkan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi yang sejalan dengan tren saat ini.

Peningkatan Aksesibilitas: Proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh sukuk juga berfokus pada peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan dan jembatan menuju lokasi-lokasi penting. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dan keagamaan.

Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan adanya dana yang memadai dari sukuk, rancangan berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan sesuai dalam batas anggaran. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya yang seringkali menjadi masalah dalam proyek-proyek pemerintah.

Salah satu contoh nyata adalah pembangunan ruang kuliah dan fasilitas praktikum di salah satu institut pendidikan. Melalui dana sukuk yang disalurkan oleh BSI, institut ini berhasil menambah ruang kuliah baru dan melengkapi fasilitas praktikum dengan peralatan modern. Hal ini meningkatkan kapasitas dan kualitas pembelajaran, serta memberikan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi mahasiswa.

2. Kepatuhan terhadap Prinsip syariah

Salah satu keunggulan utama sukuk adalah kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. BSI memastikan bahwa seluruh proses penyaluran serta pengelolaan dana sukuk yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menumbuhkan rasa tenang dan nyaman bagi investor maupun penerima manfaat.

Aspek-aspek Kepatuhan syariah:

Akad yang Sesuai syariah: Dalam penyaluran dana sukuk, BSI menggunakan berbagai macam kontrak berbasis syariah, termasuk ijarah (sewa) dan mudharabah (bagi hasil), dan wakalah (perwakilan). Pemilihan akad yang tepat memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan halal dan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau maisir (perjudian).

Pengawasan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS): BSI memiliki DPS yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional bank, termasuk penyaluran dana sukuk. Seluruh transaksi diawasi oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan memberikan rekomendasi jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki.

Investasi pada Proyek yang Halal: Dana sukuk hanya boleh diinvestasikan pada proyek-proyek yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. BSI mengadakan proses seleksi yang teliti terhadap rancangan yang akan didanai untuk memastikan bahwa tidak ada investasi pada sektor-sektor yang diharamkan oleh agama.

Transparansi dan Akuntabilitas: BSI menerapkan sistem pengelolaan dana yang

transparan dan akuntabel, sehingga investor dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana sukuk digunakan dan dikelola. Laporan keuangan dan informasi terkait proyek-proyek yang didanai oleh sukuk tersedia secara terbuka dan mudah diakses.

3. Transparansi Alokasi Dana

Transparansi alokasi dana merupakan aspek penting dalam pengelolaan sukuk. BSI berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses alokasi dana sukuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga investor dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Hal ini juga dibuktikan dengan keberhasilan penyelesaian tujuh proyek pembangunan yang seluruhnya disalurkan melalui BSI. Setiap proyek, seperti Palangka Raya, ruang kelas baru di MTsN Palangka Raya, serta open stage di IAHN Tampung Penyang, telah berdiri dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa dana sukuk benar-benar dialokasikan sesuai prinsip syariah hanya untuk investasi pada kegiatan halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi alokasi dana ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BSI.

Kontribusi BSI sebagai penyalur dana sukuk untuk pembangunan infrastruktur di kementerian agama Palangka Raya

1. Peran BSI dalam intermediasi keuangan

Teori Intermediasi Keuangan menekankan peran lembaga keuangan seperti Bank syariah Indonesia (BSI) sebagai penghubung antara pemilik dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (pemerintah/proyek infrastruktur). BSI menerbitkan sukuk—instrumen syariah berbasis aset nyata—untuk mengumpulkan dana dari investor, lalu menyalurkannya ke proyek infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan. Selain itu, BSI mengurangi biaya transaksi, mengelola risiko (pemantauan

proyek, evaluasi finansial), dan memastikan transparansi informasi. Scholtens & van Wensveen (2003) menambahkan bahwa intermediasi modern mencakup transformasi aset keuangan, pemrosesan informasi, dan pemantauan perilaku peminjam untuk meminimalkan risiko asimetris.

Maka dapat diartikan bahwa BSI bertindak sebagai penghubung antara investor sukuk (masyarakat) dan proyek infrastruktur Kementerian Agama. BSI melakukan transformasi aset dengan mengonversi dana sukuk menjadi pembiayaan produktif (misal: pembangunan madrasah). Manajemen risiko dilakukan melalui Dewan syariah BSI untuk memastikan proyek bebas dari riba, gharar, dan maysir.

2. Peran BSI dalam investasi syariah

Investasi syariah menolak riba, gharar (ketidakpastian eksekusi), dan maysir (spekulasi), serta mengutamakan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Sukuk, sebagai instrumen syariah, wajib didukung aset produktif (underlying asset) seperti proyek infrastruktur, dengan transaksi transparan dan kepatuhan syariah. Skema ini memastikan dana digunakan untuk kegiatan ekonomi nyata, menghindari praktik non-produktif, dan menjamin keuntungan dibagi sesuai kontribusi risiko masing-masing pihak. Prinsip ini memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kontribusi BSI menjadi sangat signifikan. Keberadaan BSI memberikan keyakinan bahwa penyaluran dana sukuk dilakukan selaras dengan ajaran syariah Islam dan peraturan yang berlaku. Keyakinan ini, yang dibangun atas dasar kepastian dan kredibilitas BSI dalam perbankan syariah, bahkan mendapatkan validasi dari Kementerian Agama, mengukuhkan peran penting BSI dalam memastikan implementasi sukuk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum.

Dapat diartikan bahwa Sukuk yang disalurkan BSI ke Kementerian Agama

berbasis aset fisik (misal: gedung madrasah), menghindari spekulasi. BSI menggunakan skema bagi hasil (mudharabah) atau sewa (ijarah) untuk memastikan keuntungan adil dan transparan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank syariah Indonesia (BSI) memainkan peran krusial dalam penyaluran dana sukuk untuk pembiayaan infrastruktur di Kementerian Agama Palangka Raya. Penyaluran dana sukuk oleh BSI memberikan alternatif pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah, mendukung proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Kolaborasi ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, tetapi juga mempercepat pembangunan fasilitas sosial, pendidikan, dan keagamaan yang sangat dibutuhkan. BSI berkontribusi pada pengembangan pasar sukuk di Indonesia, memajukan ekonomi berbasis syariah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Adapun implikasi untuk praktisi perbankan syariah BSI menjadi contoh bagaimana skala besar dan kolaborasi dengan pemerintah dapat mempercepat pembangunan syariah, tetapi perlu diimbangi dengan inovasi dan tata kelola yang lincah.

Adapun bagi teoritis keuangan syariah Studi kasus BSI memperkaya wacana akademis dengan menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya relevan dalam mikroekonomi, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam kebijakan makroekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agita Eka Yuliani, Tettet Fitrianti, & Prima Yusi Sari. (2020). Sovereign Sukuk As An Alternative Of Infrastructure

- Project Financing In Indonesia: Systematic Literature Review., *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7, 3.
- Aini, N., & Luthfi, H. A. (2019). Analisis Peran Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 30.
- Amin Rukhul. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Atika, A. (2018). Analisis Pengaruh Penerbitan Dana Sukuk Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1817>
- Aziz, I. A., Nurwahidin, N., & Ch, I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menyalurkan donasi melalui platform crowdfunding berbasis online. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Diniyah, H., Hamdani, I., & Hakiem, H. (2022). Mekanisme Penjualan Sukuk Ritel Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kc Bogor Pajajaran Sukasari). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 3968.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 6. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Ibrahim, Z. (2013). Potensi Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Di Banten. *Alqalam*, 30(2), 293. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v30i2.1068>
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Analisis Peran Dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997>
- Khunaifi, A. R., & Fitriyanto, M. N. (2024). *Evaluasi Sertifikasi Guru Melalui Sistem Manajemen Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan (Simpatika) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan*. 2(4), 278.
- Kurniawan, R., Akbar, Wahyu, Safitri Angga Novi, & Theara Resha. (2022). *Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah*. 7(1), 100–101.
- Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 52.
- Nabela, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonom Negara Di Asia Tenggara. *Islamic Banking And Finance*, 5(2), 369.
- Nur Iman Hakim Al Faqih. (2018). Model Implementasi Fungsi Intermediasi Bank Syariah Di Indonesia. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 6.
- Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 320–329. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151>
- Pardi, A., & Kurniawan, Y. S. (2024). Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam Untuk Pembangunan. *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic)*, 5(01).
- Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan Sukuk Untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458>
- Rachmansyah, A. N. (2025). Strategi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama Dalam

- Mendukung Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 3(2), 10. <https://doi.org/10.61860/Jigp.V3i2.52>
- Raharjo Raharjo. (2023). Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 75–96. <https://doi.org/10.61132/Anggaran.V1i4.241>
- Rindang Bangun Prasetyo & Muhammad Firdaus. (2012). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 225.
- Robin, Putri Febiana Sari, D., & Fadhullah Hana, K. (2020). Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 87–103. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V17i1.79>
- Selamet, H. & Devid Frastiawan Amir Sup. (2021). Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(1), 210–211.
- Suherman, S., Kristina, P., & Natalia, D. (2024). Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*, 4(6), 3119–3131. <https://doi.org/10.54373/Ifijeb.V4i6.2385>
- Syafrida, I., Nugroho, H., & Savitri, E. (2017). Pemanfaatan Dana Sukuk Pada Dua Bank Syariah Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Nisbah*, 3(2), 384.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 39. <https://doi.org/10.36490/Syiar.V3i2.1074>